

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang ini pendidikan merupakan kebutuhan primer, dimana orang-orang berlomba untuk dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin dan untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS). Hal ini dilakukan agar dapat mengarungi kehidupan yang serba canggih dan dapat mengikuti kuatnya pengaruh globalisasi yang merambah seluruh bidang kehidupan. Oleh karena itu, dapat dikatakan pendidikan sebagai salah satu usaha yang memegang peranan penting dalam investasi masa depan.

Dapat dikatakan demikian manakala tingkat pendidikan suatu negara dikatakan tinggi, setidaknya peradaban dan pola pikir masyarakat di negara tersebut haruslah tinggi pula, keberhasilan suatu negara banyak tergantung pada kemajuan tingkat pendidikannya. Karena pendidikan akan menjadikan masyarakat disetiap negara khususnya masyarakat Indonesia yakni generasi muda penerus bangsa (*agent of change*) menjadi orang-orang yang cerdas dan dapat menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk bangsa dan negara (Hasbullah, 2007:16).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Pendidikan bagi warga negara merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan mustahil suatu kelompok manusia dapat berkembang dengan aspirasi (cita-cita)

untuk maju, sejahtera, dan bahagia. Salah satu usaha dibidang pendidikan adalah dengan meningkatkan mutu (kualitas) pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.

Hal ini juga sejalan dengan amanat yang dituangkan dalam undang-undang dasar 1945 pasal 31 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Pasal 31 Ayat (1), (2) UU No. 20 Tahun 2003). Sementara itu peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 pasal 1 menyebutkan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sedangkan undang-undang republik indonesia nomor 20 bab IV pasal 6 tahun 2003 yang berisi setiap warga negara yang berusia 7-15 (tujuh sampai dengan lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Adanya program wajib belajar ini untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar seluas-luasnya kepada warga indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, budaya, sosial, dan ekonomi. Maka masyarakat harus ikut dalam program tersebut, minimal masyarakat mendapatkan jenjang pendidikan dasar, agar masyarakat tidak tertinggal akan pendidikan. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara indonesia, agar masyarakat dapat menerima pelayanan pendidikan yang bermutu, merata, dan adil. Sehingga masyarakat dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin (bab IV Pasal 6 dan Pasal 1 UU No. 47 Tahun 2008). Namun, amanat yang jelas-jelas memiliki dasar dan payung hukum tersebut dengan berbagai dalih dan alasan belum terlaksana secara maksimal, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengenyam pendidikan dibangku sekolah.

Fakta di zaman sudah modern seperti sekarang ini masih banyak anak-anak usia sekolah 7-12 dan 12-15 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan, dari yang berpendidikan SD, SMP, dan SMA. Hal tersebut dapat dilihat dari daerah-daerah yang berada jauh dari pusat pemerintahan banyak yang mengalami kegagalan untuk meraih pendidikan yakni anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan (<file:///E:/skripsi: Hasannah Arlistyan Rizca, Peran Pendidikan Luar Sekolah Dalam Pembangunan Pendidikan Di Pedesaan : 2015 Oleh stiaalmawa.blogspot.com.Hal:1-2>).

Tidak melanjutkan pendidikan bukan merupakan persoalan baru dalam sejarah pendidikan, masalah ini telah berakar dan tak pernah berakhir, sehingga membuat pendidikan di negara Indonesia menjadi suatu masalah yang cukup kompleks. Oleh karena itu peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam membangun pendidikan. Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (pasal 1 ayat (8) UU nomor 23 tahun 2014). Desentralisasi pendidikan berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas dari unit atau pejabat pusat kepada unit atau pejabat dibawahnya untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam menyelenggarakan pembangunan dibidang pendidikan. Pembangunan dibidang pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.

Mengapa pembangunan dibidang pendidikan dikatakan menjadi sangat penting, karena perannya sangat signifikan diberbagai bidang kehidupan umat manusia. Baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Oleh karenanya dikatakan kembali bahwa negara

melalui pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa negara indonesia (Jurnal S-1 Juni 2015 <http://jurnalis.untan.ac.id>, File Skripsi: Nilla Cristyani, *Masalah Anak Putus Sekolah Dalam Program Pendidikan Gratis Di Desa Rantau Panjang Kabupaten Kayong utara*). Berdasarkan desentralisasi tentunya pemerintah desa mempunyai kewenangan dalam mengurus desanya sendiri, sehingga pemerintah desa kini lebih leluasa dalam mengelola serta meningkatkan potensi yang di miliki desanya termasuk Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga pemerintah desa mempunyai peranan penting dalam menjamin hak masyarakatnya, dikarenakan pemerintah desa yang lebih dekat secara wilayah serta memahami dan mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakatnya, dalam hal ini kebutuhan dasar masyarakat dibidang pendidikan. Hal ini tentunya sesuai dengan peran pemerintah sebagai edukasional yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam membangkitkan kemampuan dan kesadarannya dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya dengan ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki (File:///C:/Jurnal////SKRIPSI.pdf Ahmad Fauzi R. Analisis Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo. 2015. oleh google cendekia.Hal:1).

Dalam undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintah desa yang telah di revisi dari undang-undang sebelumnya yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia (UU No. 6 Tahun 2014). Pemimpin diperlukan untuk mengendalikan dan

mengkondisikan jalannya organisasi sedemikian rupa sehingga organisasi tersebut tetap pada jalur yang benar. Salah satu peran yang sangat penting dalam proses pengelolaan suatu organisasi adalah kemampuan mengintegrasikan berbagai kegiatan yang di selenggarakan oleh satuan kerja yang ada dibawahnya demi terwujudnya kesatuan gerak dan memudahkan dalam pencapaian tujuan organisasi. Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati untuk mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain motivasi adalah proses menghasilkan tenaga yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam suatu kelompok motivasi sebagai penggerak kepada kejayaan organisasi, motivasi memainkan peran yang sangat penting dalam organisasi termasuk juga dalam organisasi pemerintahan (Sudarwan: 2005:16).

Desa Kuhanga merupakan daerah pesisir dan agraris sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai Petani dan Nelayan. Tetapi lebih dominan pekerjaan masyarakat di Desa Kuhanga yakni Petani, karena letak geografis dan geomorfologi di Desa Kuhanga sangat cocok untuk persawahan (*Sumber: Data Desa Kuhanga Tahun 2017*). Sistem perekonomian dan angkatan kerja dalam suatu lingkungan masyarakat yang dilihat dari data desa Kuhanga dijabarkan sebagai berikut Petani 225 KK, Pedagang 10 KK, Nelayan 15 KK, PNS 19 orang dan Tukang 24 orang.

Desa Kuhanga salah satu desa dari 17 desa yang berada di Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang terletak kurang lebih 3 km ke arah barat dari pusat Kecamatan. Desa Kuhanga memiliki luas wilayah 217 Ha dan jumlah penduduk pada tahun 2017 adalah 1.172 jiwa, laki-laki 597 jiwa dan perempuan 575 jiwa dari 331 KK, terbagi atas IV dusun yakni dusun I jumlah laki-laki 178 dan perempuan berjumlah 166 jiwa jumlah keseluruhan 344 jiwa, dusun II jumlah laki-laki 130 dan perempuan berjumlah 110 jiwa jumlah keseluruhan 240 jiwa, dusun III jumlah laki-laki 137 dan perempuan berjumlah 139 jiwa jumlah keseluruhan 276 jiwa

dan dusun IV jumlah laki-laki 161 dan perempuan berjumlah 151 jiwa jumlah keseluruhan 312 jiwa (*Sumber: Data Desa Kuhanga Tahun 2017*). Profesi orang tua anak yang tidak melanjutkan pendidikan di desa Kuhanga sebagian besar adalah petani dan nelayan. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani di wilayah ini hanya mengharapkan hasil pertanian sawah tadah hujan sehingga setiap tahunnya hanya dua kali panen. Disisi lain kebutuhan sekolah para anak-anak merupakan kewajiban yang setiap harinya harus dipenuhi. Jangankan untuk biaya pendidikan anak-anak mereka, biaya untuk kebutuhan sehari-hari saja mereka sudah kesulitan.

Sedangkan anak yang orang tuanya bekerja sebagai nelayan juga mengalami hal yang sama, kondisi nelayan kecil tentu tidak mudah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga untuk mendapatkan hasil yang lebih besar diperlukan pekerjaan dan tenaga yang lebih besar pula, tidak cukup dengan tenaga ayah dan ibu saja (dalam skripsi: Papatungan liswanda, *Hubungan Status Sosial Ekonomi Orang Tua dengan Anak Putus Sekolah di Desa Kuhanga Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara: 2015.Hal:49*). Upaya yang dilakukan orang tua untuk itu adalah membutuhkan tambahan orang untuk membantu mereka bekerja. Dalam hal ini mereka tidak mengambil pekerja dari luar yang sedang mencari pekerjaan, melainkan mereka mengambil tenaga dari anak-anak mereka, karena kalau mereka mengambil tenaga dari luar keluarga maka diperlukan lagi dana untuk membayar upah orang tersebut, padahal kondisi keuangan terus menurun. Tetapi kalau pekerjaannya dibantu oleh pekerja dari anggota keluarga, maka tidak perlu di gaji. Sehingga pemasukan keuangan bertambah tanpa harus mengeluarkan dana seperti mengambil tenaga pekerja dari luar keluarga dengan adanya orang tua yang mengambil tenaga pekerja dari anaknya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka sekolah anak akan terganggu, seperti tidak semangatnya anak dalam belajar disekolah akibat kelelahan karena bekerja (dalam skripsi: Papatungan liswanda, *Hubungan Status Sosial Ekonomi Orang*

Tua dengan Anak Putus Sekolah di Desa Kuhanga Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara: 2015.Hal:49).

Sehingga anak-anak usia sekolah di desa Kuhanga banyak yang mengalami kegagalan untuk meraih pendidikan. Berdasarkan data desa Kuhanga menunjukkan masih adanya anak yang tidak melanjutkan pendidikan setiap tahunnya, dimana jumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan dari tahun 2016 sampai tahun 2017 mencapai angka 67 orang anak, dari yang berpendidikan SD, SMP, dan SMA (*Sumber: Data Diperoleh Dari Observasi Yang Peneliti Lakukan Dilokasi penelitian Dan Berpatokan Pada Data Yang Diambil Dari Kantor Desa Kuhanga Tahun 2017*).

Anak yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) berjumlah 14 orang, laki-laki berjumlah 13 orang dan perempuan 1 orang, sedangkan anak yang tamat Sekolah Dasar (SD) berjumlah 13 orang, laki-laki berjumlah 9 orang dan perempuan 4 orang, sedangkan anak yang tidak tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) 14 orang, laki-laki berjumlah 11 orang dan perempuan 3 orang, sedangkan yang tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 13 orang, laki-laki berjumlah 6 orang dan perempuan 7 orang, sedangkan anak yang tidak tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat berjumlah 12 orang, laki-laki 2 orang dan perempuan 10 orang Ini menjadi masalah yang serius untuk diteliti karena masih ada anak dengan jumlah tersebut tidak melanjutkan pendidikan. Anak tidak melanjutkan pendidikan yang terjadi di desa Kuhanga disebabkan oleh berbagai faktor yaitu rendahnya minat anak untuk bersekolah, ekonomi lemah orang tua dan menikah diusia sekolah.

Sehingga peran kepala desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa Kuhanga, karena kepala desa memiliki wewenang untuk mengatur, menjaga, dan memotivasi warganya dalam memenuhi

kebutuhan masyarakatnya, dalam hal ini kebutuhan dasar masyarakat dibidang pendidikan. Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: ***“Peran Kepala Desa Kuhanga Dalam Memotivasi Orang Tua Untuk Melanjutkan Pendidikan Anak Kejenjang Sekolah Dasar Dan Menengah Di Desa Kuhanga Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongodow Utara”***.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepala desa Kuhanga dalam memotivasi orang tua untuk melanjutkan pendidikan anak kejenjang sekolah dasar dan menengah ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak usia sekolah tidak melanjutkan pendidikan kejenjang sekolah dasar dan menengah di desa Kuhanga ?

1.3 Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepala desa Kuhanga dalam memotivasi orang tua untuk melanjutkan pendidikan anak kejenjang sekolah dasar dan menengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak usia sekolah tidak melanjutkan pendidikan kejenjang sekolah dasar dan menengah di desa Kuhanga.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian peran kepala desa Kuhanga dalam memotivasi orang tua untuk melanjutkan pendidikan anak kejenjang sekolah dasar dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sesuatu yang berguna dalam tataran teoritis bagi pengembangan keilmuan sesuai dengan tujuan penelitian ini. Penulis juga

berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memperkaya fakta-fakta dan teori tentang peran pemerintah desa, selain itu dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sistem pemerintahan daerah dan sistem pemerintahan desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kepala Desa

- 1) Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kepala desa beserta jajarannya. Dalam menjalankan peran sebagai motivator untuk meningkatkan kesadaran terhadap pendidikan.
- 2) Dapat memberikan masukan dan solusi kepada kepala desa dalam menjalankan perannya.

b. Bagi Masyarakat

- 1) Dengan penelitian ini dapat dijadikan stimulus bagi masyarakat akan pentingnya pendidikan guna menciptakan sumber manusia yang kompetitif.
- 2) Dengan penelitian ini dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan untuk masa depan.

c. Bagi Jurusan

- 1) Menambah referensi kepustakaan jurusan pendidikan kewarganegaraan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 2) Dapat membantu mahasiswa PPKn apabila akan menjalankan penelitian yang memang topiknya sama.